

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN  
DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA  
LANGSUNG PADA PEMERINTAH  
KOTA TANJUNGPINANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi

Oleh

**KUNDARIATI  
NIM : 15622169**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN  
TANJUNGPINANG**

**2019**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN  
DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA  
LANGSUNG PADA PEMERINTAH  
KOTA TANJUNGPINANG**

**SKRIPSI**

**KUNDARIATI  
NIM : 15622169**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN  
TANJUNGPINANG**

**2019**

TANDA PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN  
DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA  
LANGSUNG PADA PEMERINTAH  
KOTA TANJUNGPINANG**

Diajukan Kepada:

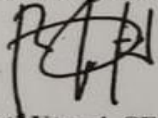
Panitia Komisi Ujian  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan  
Tanjungpinang

Oleh

Nama : KUNDARIATI  
NIM : 15622169

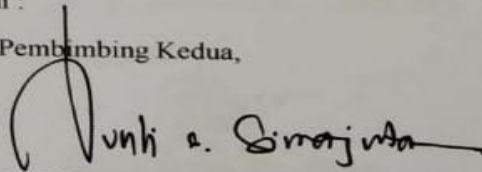
Menyetujui :

Pembimbing Pertama,



**Ranti Utami, SE., M.Si., Ak.CA**  
NIDN. 1004117701/Lektor

Pembimbing Kedua,



**Juhli Edi S, SE.,MM.,Ak.CA.CfrA**  
NIDN.1007057303

Mengetahui,  
Ketua Program Studi,



**Sri Kurnia, SE, Ak., M.Si., CA**  
NIDN.1020037101/Lektor

Skripsi Berjudul

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN  
DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA  
LANGSUNG PADA PEMERINTAH  
KOTA TANJUNGPINANG

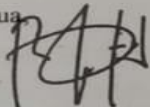
Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

Nama : KUNDARIATI  
NIM : 15622169

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal Sebelas Bulan  
Desember Tahun Dua Ribu Sembilan Belas dan  
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

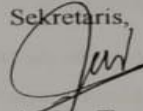
Panitia Komisi Ujian

Ketua



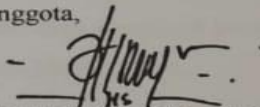
**Ranti Utami, SE., M.Si., Ak.CA**  
NIDN. 1004117701/Lektor

Sekretaris,



**Andry Tonnava, SE., M.Ak**  
NIDK. 8823900016/Asisten Ahli

Anggota,



**Hendy Satria, SE., M.Ak**  
NIDN. 1015069101/Lektor

Tanjungpinang, Desember 2019  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan  
Tanjungpinang



**Charly Marlinda, SE., M.Ak., Ak., CA**  
NIDN. 1029127801/Lektor



## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah dan sujud syukur yang selalu ku ucapkan kepada Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya yang diberikan kepadaku dalam mempersembahkan skripsi ini untuk keluargaku tercinta.

Dan sholawat yang tak henti ku sampaikan kepada baginda Muhammad SAW, yang menjadi tauladan terbaik dan semoga mendapat syafaat dari beliau.

♥ Ku persembahkan skripsiku untuk keluargaku ♥

Ibuku **Sutarmi** dan bapakku **Tukiman**

Yang telah membesarkanku dengan kasih sayangnya sepanjang masa, selalu mendoakanku, nasehat-pengorbanan-jasamu yang tiada henti, memberi semangat dan mendukungku serta selalu menguatkan ku dalam menghadapi kehidupan ini.

Abangku **Samsul Hadi**, Kakakku **Dewi Sukesti**, Kakakku **Rini Sulistiani**, Adekku **Siti Hidayati** dan Adekku **Maulana Rifa'i**.

Yang telah mendoakanku, mendukungku, menyemangatiku dan membantuku selama ini.

Anakku tercinta **Faiz Ikhsan Darwandi**

Kesayanganku, semangatku, motivasiku, harapanku yang selalu membuatku semakin kuat.

Semoga langkah awalku untuk masa depan yang lebih baik dan impian yang akan diraih bisa terwujud dan membuat kalian bahagia. Terimakasih atas doa restunya untukku dan hanya Allah yang akan membalasnya.

*"If you get tired, Learn to rest, Not to quit!"*

## **KATA PENGANTAR**

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang karena berkat rahmat, taufiq dan hidayahNya penulis diberikan keberkahan kesehatan, waktu, ilmu dan pengetahuan sehingga penulis dapat merasakan segala kesempatan yang diberikannya. Sholawat dan salam pelulis sampaikan kepada junjungan alam yaitu Nabi Muhammad SAW semoga penulis selalu mendapat syafaat dari beliau.

Alhamdulillah, penulis selalu bersyukur atas ridhoNya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Kota Tanjungpinang”.

Penulis sangat menyadari bahwa banyak pihak yang sudah membantu dan memberikan dukungan baik itu motivasi, arahan dan bimbingan yang diperlukan selama melaksanakan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, saya selaku penulis dan penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Charly Marlinda, SE.,M.Ak.,Ak.,CA selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku Wakil Ketua I dan Dosen Pembimbing I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan

Tanjungpinang yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama melaksanakan penyusunan skripsi ini.

3. Ibu Sri Kurnia, SE.,Ak.,M.Si.,CA selaku Wakil Ketua II dan Ketua Program Studi Akuntansi yang telah mendidik selama penulis menjadi mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Hendy Satria, SE.,M.Ak selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi yang telah mendidik selama penulis menjadi mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
5. Bapak Juhli Edi S, SE.,MM.,Ak.,CA.,CFrA selaku Dosen Pembimbing II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama melaksanakan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Pengajar yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu dan pengetahuannya selama penulis menjadi mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
7. Staf Adminitrasi, Keuangan, Perpustakaan dan seluruh karyawan dan karyawan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang
8. Seluruh keluarga besarku yang turut membantu dan mendoakanku selama ini.
9. Teman-teman sekelas dari semester awal hingga akhir jurusan akuntansi M1 angkatan 2015 yang selalu memberikan semangat dan berbagi ilmunya kepada penulis.



10. Teman-teman kerja yang selalu mendukungku, mendoakanku bahkan membantuku baik pikiran dan tenaganya.
11. Dan pihak-pihak terkait dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Demikian yang dapat Penulis sampaikan, dengan kerendahan hati Penulis mengucapkan terimakasih tak terhingga kepada semua yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini. Dan tentunya skripsi ini masih belum sempurna, oleh karena itu saya penulis yang masih terdapat kesalahan meminta mohon maaf. Penulis sangat berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak pada umumnya dan bagi mahasiswa pada khususnya.

Tanjungpinang, 07 November 2019

Penulis,

Kundariati

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN MOTTO	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAK .....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
BAB I     PENDAHULUAN.....	1
1.1    Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2    Rumusan Masalah.....	7
1.3    Batasan Masalah .....	8
1.4    Tujuan Penelitian .....	8
1.5    Kegunaan Penelitian .....	8
1.5.1 Kegunaan Ilmiah.....	8
1.5.2 Kegunaan Praktisi .....	9
1.6    Sistematika Penulisan .....	9
BAB II    TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1    Tinjauan Teori .....	12
2.1.1 Penganggaran Sektor Publik.....	12
2.1.2 Fungsi Penganggaran Sektor Publik.....	13
2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) .....	15
2.1.3.1. Pengertian APBN .....	15

2.1.3.2. Fungsi APBN .....	16
2.1.3.3. Struktur APBN .....	17
2.1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	18
2.1.4.1. Pengertian APBD .....	18
2.1.4.2. Fungsi APBD .....	19
2.1.4.3 Struktur APBD .....	19
2.1.5 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.....	20
2.1.6 Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	22
2.1.6.1 Pengertian PAD.....	22
2.5.6.2 Sumber PAD .....	23
2.1.7 Dana Perimbangan .....	25
2.1.7.1 Pengertian Dana Perimbangan .....	25
2.1.7.2 Dana Bagi Hasil .....	26
2.1.7.3 Dana Alokasi Umum (DAU).....	27
2.1.7.4 Dana Alokasi Khusus (DAK).....	30
2.1.8 Belanja Daerah.....	33
2.1.8.1 Pengertian Belanja Daerah .....	33
2.1.8.2 Belanja Tidak Langsung.....	34
2.1.8.3 Belanja Langsung.....	34
2.2 Kerangka Pemikiran .....	35
2.3 Hipotesis Penelitian .....	36
2.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Langsung .....	37
2.3.2 Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Langsung.....	37
2.3.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Langsung ..	38
2.4 Penelitian Terdahulu .....	39
<b>BAB III METEDOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>52</b>

3.1	Jenis Penelitian .....	52
3.2	Jenis Data.....	52
	3.2.1 Data Sekunder.....	52
3.3	Tehnik Pengumpulan Data .....	53
3.4	Difinisi Operasional Variabel .....	53
	3.4.1 Variabel Independen/variabel bebas (X) .....	53
	3.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1).....	54
	3.4.1.2 Dana Perimbangan (X2).....	54
	3.4.2 Variabel Dependen/variabel terikat (Y).....	55
3.5.	Teknik Pengolahan Data.....	55
3.6	Tehnik Analisis Data .....	56
	3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif .....	56
	3.6.2 Uji Asumsi Klasik.....	56
	3.6.2.1 Uji Normalitas .....	56
	3.6.2.2 Uji Multikolinearitas .....	57
	3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas .....	58
	3.6.2.4 Uji Autokorelasi .....	58
	3.6.3 Analisis Regresi Linier Berganda.....	59
	3.6.4 Pengujian Hipotesis .....	60
	3.6.4.1 Uji Parsial (uji t).....	60
	3.6.4.2 Uji Simultan (uji F) .....	60
	3.6.5 Uji Koefisien Determinasi .....	61
3.7	Jadwal Penelitian .....	62
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>63</b>
4.1	Hasil Penelitian.....	63
	4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	63
	4.1.2. Visi, Misi dan Arti Lambang Pemerintah Kota- Tanjungpinang .....	64
	4.1.2.1 Visi dan Misi .....	64
	4.1.2.2 Arti Lambang Pemko Tanjungpinang .....	65
	4.1.3. Penyajian Data .....	67

4.1.3.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1) .....	67
4.1.3.2	Dana Perimbangan (X2).....	69
4.1.3.3	Belanja Langsung (Y) .....	72
4.1.4.	Analisis Data.....	74
4.1.4.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	74
4.1.4.2	Uji Asumsi Klasik .....	75
4.1.4.3	Analisis Regresi Linear Berganda .....	82
4.1.4.4	Pengujian Hipotesis .....	84
4.1.4.5	Uji Koefisien Determinasi .....	86
4.2	Pembahasan .....	87
4.2.1	Pengaruh PAD terhadap Belanja Langsung .....	87
4.2.2	Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja- Langsung .....	88
4.2.3	Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap- Belanja Langsung .....	89
BAB V	PENUTUP .....	90
5.1	Kesimpulan .....	90
5.2	Saran .....	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURICULUM VITAE

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Perkembangan PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Langsung Kota Tanjungpinang .....	6
Tabel 4.1 Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang Tahun 2007-2018 .....	67
Tabel 4.2 Data Dana Perimbangan Kota Tanjungpinang Tahun 2007-2018....	70
Tabel 4.3 Data Belanja Langsung Kota Tanjungpinang Tahun 2007-2018.....	72
Tabel 4.4 Hasil Analisis Statistik Deskripsi.....	74
Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas ( <i>Kolmogorov Smirnov</i> ) .....	78
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas.....	79
Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi .....	82
Tabel 4.8 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda .....	83
Tabel 4.9 Hasil Uji t (Pengaruh Secara Parsial).....	85
Tabel 4.10 Hasil Uji F (Pengaruh Secara Simultan).....	86
Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	87

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	36
Gambar 4.1 Grafik Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang ....	69
Gambar 4.2 Grafik Dana Perimbangan Kota Tanjungpinang.....	71
Gambar 4.3 Grafik Belanja Langsung Kota Tanjungppinang .....	73
Gambar 4.4 Hasil Uji Normalitas (Grafik Histogram).....	76
Gambar 4.5 Hasil Uji Normalitas ( <i>Normal Probability Plot</i> ).....	77
Gambar 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Grafik <i>Scatterplot</i> ).....	81

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Langsung Kota Tanjungpinang Tahun
- Lampiran 2 Penyajian Data Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Langsung Kota Tanjungpinang Tahun 2007-2018
- Lampiran 3 Hasil Pengujian SPSS Versi 22.00
- Lampiran 4 Lembar *Plagiarism Checker X Originality Report*



## ABSTRAK

### **PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA LANGSUNG PADA PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG**

Kundariati.15622169.Akuntansi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE)  
Pembangunan Tanjungpinang.www.stie-pembangunan.ac.id

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruhnya Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan adalah laporan realisasi anggaran berupa skala nominal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Langsung yang kemudian akan diuji menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan pengujian hipotesis. Setelah data terkumpul kemudian data dianalisis dengan menggunakan SPSS versi 22.00.

Hasil penelitian yang dilakukan pada Pemerintah Kota Tanjungpinang pada tahun 2007 sampai dengan 2018 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Langsung dengan nilai signifikan sebesar 0.042 dan Dana Perimbangan secara parsial juga berpengaruh terhadap Belanja Langsung dengan nilai signifikan sebesar 0.045. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk perhitungan nilai *R Square* besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 0,78 atau 78%.

Kesimpulan dari penelitian ini Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Langsung dan secara simultan kedua variabel tersebut juga berpengaruh terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Kota Tanjungpinang.

**Kata Kunci :** PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Langsung

Skripsi.Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang,  
November 2019

(xi + 92 halaman + 12 Tabel + 7 Gambar + 4 Lampiran)

Referensi : 30 buku (2009-2018) dan 5 jurnal  
Dosen Pembimbing I : Ranti Utami, SE.,M.Si.,Ak.,CA  
Dosen Pembimbing II : Juhli Edi S, SE.,MM.,Ak.,CA.CFrA

## **ABSTRACT**

### **THE INFLUENCE OF LOCAL OWN-SOURCE REVENUE AND BALANCE FUND ON DIRECT EXPENDITURE OF TANJUNGPINANG CITY GOVERNMENT**

*Kundariati. 15622169. Accounting Major. School High Science Economics (STIE)  
Development Tanjungpinang. www.stie-pembangunan.ac.id*

*The main aim of this research is to determine the influence of local own-source revenue and fiscal balance toward direct expenditure of Tanjungpinang City Government.*

*This research applied quantitative descriptive method and the data was obtained from statement of budget realization in the form of nominal scale, based on the local own-source revenue, balance fund and direct expenditure. These findings will be examined using descriptive statistical analysis, the classical assumption test, multiple linear regression and hypothesis testing. The collected data was analysed using SPSS (Statistic Product and Service Solution) version 22.00.*

*The research conducted at Tanjungpinang City Government from 2007 until 2018 showed that the local own-source revenue and balance fund partially affected direct expenditure with significant value of 0.042 and 0.045 respectively. Furthermore, this study conclude that in the calculation of R square, the influence value of independent variable on dependent variable is equal to 0.78 or 78%.*

*The conclusion of this research is the local own-source revenue and the balance fund partially affect direct expenditure and simultaneously these two variables also influence direct expenditure on the Tanjungpinang City Government.*

*Key words: local own-source revenue, balance fund, direct expenditure*

*Thesis. School High Science Economics (STIE) Development Tanjungpinang.  
November, 2019*

*(xi + 92 Pages + 12 Tables + 7 Images + 4 Attachments)*

*References : 30 books (2009-2018) and 5 journals*

*Advisor I : Ranti Utami, SE., M.Si., Ak., CA*

*Advisor II : Juhli Edi S, SE., MM., Ak., CA.CFrA*

## MOTTO

**Maka Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan.  
Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan.  
(Qs. Al-Insyirah [94]: 5-6)**

Barang siapa belum merasakan pahitnya belajar walau sebentar, maka akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya.

(Imam Syafi'i)

Jika hendak mengenal orang yang berilmu,

Bertanya dan belajar tiadalah jemu.

Jika hendak mengenal orang yang berakal,

Di dalam dunia mengambil bekal.

(Raja Ali Haji-Gurindam Duabelas Pasal Kelima)

*Dengan yakin untuk niat baik dan usaha yang kita lakukan akan membawa hasil yang tidak akan pernah sia-sia, terutama setiap urusan kita selalu melibatkan Allah SWT Sang Maha Pengasih dan Penyayang. Jika Dia berkehendak, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, yang sulit akan dimudahkan bahkan jalan buntu pun akan diberikan jalan keluarnya.*

*(Kundariati)*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Reformasi pemerintah yang disertai adanya tuntutan demokratisasi menjadi fenomena global termasuk di Indonesia. Tuntutan demokratisasi ini menyebabkan semakin menguatnya tuntutan aspek transparansi dan akuntabilitas. Kedua aspek tersebut menjadi penting dalam pengelolaan pemerintah termasuk di bidang pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Dengan adanya peraturan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang diberlakukan mulai Januari 2001 dan mengalami perubahan menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, telah membawa implikasi yang luas dan serius. Dengan memberikan optimis tinggi dan harapan baru untuk membangun daerah secara lebih maksimal karena sudah tidak terkonsentrasi di pusat.

Melalui UU tersebut Indonesia mengalami perubahan kenegaraan yang disebut Otonomi Daerah. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan undang-undang (Soemantri, 2014). Kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah tersebut merupakan kebijakan yang dipandang secara demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintahan yang sesungguhnya. Asas Desentralisasi adalah asas

yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu (C.S.T. Kansil & Christine S.T Kansil, 2014). Desentralisasi daerah memiliki peluang yang besar untuk mengembangkan potensi diri masing-masing dan juga menuntut kesiapan daerah untuk lebih mandiri, termasuk mengelola konflik-konflik yang berkembang baik setelah proses desentralisasi ataupun konflik-konflik yang selama ini dikelola dengan mengandalkan pemerintah pusat. Dalam pelaksanaan desentralisasi bertujuan antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan serasi antara pusat dan daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah daerah harus mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efisien dan efektif dengan mempertimbangan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan. Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah, antara lain adalah membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan daerah (Saptika, 2010). Sehingga dengan terbentuknya otonomi daerah memungkinkan daerah yang bersangkutan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah bagi pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Pembangunan daerah dalam era reformasi ini sangatlah penting untuk dilaksanakan dan perlu ditingkatkan karena pembangunan daerah sebagai integral dari pembangunan nasional, sehingga tidak bisa lepas dari prinsip

otonomi daerah. Untuk mewujudkannya, Pemerintah daerah jauh lebih memahami potensi, kondisi, dan permasalahan daerahnya sendiri. Oleh sebab itu, setiap daerah juga lebih mengerti besarnya kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintah dan pembangunan. Karena setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal inilah yang menimbulkan ketimpangan fiskal antara daerah satu dengan daerah yang lain. Oleh karena itu, Pemerintah mengalokasi dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Kemandirian Pemerintah daerah dalam mengurus dan mengelola sumber-sumber perekonomian daerah secara mandiri dan bertanggungjawab yang hasilnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Penciptaan terhadap kemandirian daerah merupakan kewenangan pemerintah daerah yang harus berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan asli daerah. Kemampuan keuangan suatu pemerintah daerah dapat diukur dengan derajat kemandirian keuangan daerah, dimana semakin tinggi derajat kemandirian suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu untuk membiayai pengelurannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat.

Kota Tanjungpinang yang merupakan ibukota dari Provinsi Kepulauan Riau sebagai Kota Otonom yang sedang berkembang dan tentunya mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan dengan tujuan jelas yaitu memberikan

kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah tersebut, maka diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab serta kemampuan menggali sumber keuangan daerahnya sendiri. Sumber penerimaan yang diterima dari potensi yang ada di Pemerintah Kota Tanjungpinang sendiri berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah. Karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur kemampuan suatu daerah. Dengan semakin besar kontribusi yang diberikan PAD terhadap APBD akan menunjukkan semakin besar kemampuan daerah dalam mengelola pembangunan di daerahnya sendiri dan semakin kecil ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat.

Fenomena yang terjadi pada Pemerintah kota Tanjungpinang dalam menggali potensi yang ada, Kota Tanjungpinang belum optimal dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya untuk mendanai kegiatan/program yang menjadi tujuan pemerintah daerahnya. Dengan didukung potensi alam yang sangat potensial, dan kemajuan pembangunannya, dari sektor potensi alam kota Tanjungpinang menjadi tempat wisata bersejarah yang akan menarik wisatawan dari mancanegara. Sehingga seharusnya dari sini dapat meningkatkan pajak daerahnya dari pajak hotel maupun pajak restoran. Di sisi lain dengan pembangunan yang semakin maju seperti adanya gedung gonggong dan mall-mall yang menjadi kunjungan masyarakat setempat maupun dari luar yang juga akan meningkatnya retribusi

daerah dari retribusi parkir. Namun organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dalam mengelolanya sudah berupaya dengan potensi yang ada, tetapi belum dapat mengoptimalkannya dengan baik. Dengan beberapa permasalahan yaitu karena masih kurangnya kesadaran partisipasi masyarakat/wajib pajak untuk membayar pajak maupun sesuai ketentuan yang berlaku, penerapan sanksi pajak belum dilaksanakan secara tegas, kurangnya kuantitas dan kualitas SDM pengelolaan pajak dan retribusi.

Dari PAD yang belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dalam membiayai kegiatan/program yang dilaksanakan Kota Tanjungpinang, Ternyata Kota Tanjungpinang masih bergantung dari pusat untuk menyelenggarakan pemerintahannya dengan adanya bantuan dana transfer dari pusat dalam bentuk dana perimbangan. Tujuan transfer dana, sebagaimana juga merupakan arah dari kebijakan fiskal Pemerintah Pusat dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, antara lain untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, serta antar daerah, dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah. Peranan Pemerintah Pusat untuk bertanggung jawab menjaga keseimbangan alokasi dana antar daerah. Oleh karena itu, Pemerintah pusat melakukan transfer dana ke daerah melalui beberapa mekanisme dalam bentuk dana perimbangan seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Ketiga dana perimbangan tersebut mempunyai tujuan dan sifat dasar yang berlainan satu sama lain yang akan disalurkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu dalam pengelolaannya, pemerintah daerah harus mempertanggung jawabkannya kepada Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hingga kini, dana perimbangan masih merupakan sumber penerimaan terbesar daerah. Dana transfer ke daerah secara nominal meningkat walaupun dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang tidak mungkin dihindari seperti pada penerimaan DAK yang relatif rendah disebabkan kurangnya perencanaan dan koordinasi dengan pemerintah pusat, terkait pelaksanaannya dengan rencana teknis tidak dapat diprediksi, dan terjadi keterlambatan dalam penyampaian pelaporan ke pusat.

Dapat dilihat bahwa perkembangan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Belanja Langsung pada Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam 5 tahun belakang ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Langsung**  
**Kota Tanjungpinang**

No.	Tahun	PAD (dalam rupiah)	Dana Perimbangan (dalam rupiah)	Belanja Langsung (dalam rupiah)
1.	2014	125.171.740.484,86	634.006.093.618,00	563.566.515.824,00
2.	2015	135.893.490.240,50	460.334.937.844,00	329.885.523.540,00
3.	2016	126.045.740.738,15	758.913.132.174,00	430.563.715.844,00
4.	2017	171.711.370.675,54	662.248.533.572,00	465.330.819.068,10
5.	2018	167.438.472.195,55	699.727.386.819,00	395.703.836.267,39

*Sumber : BPKAD Kota Tanjungpinang (data diolah), 2019*

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa PAD mengalami peningkatan pada tahun 2015 dan 2017, namun mengalami penurunan pada tahun 2016 dan 2018. Untuk Dana Perimbangan mengalami peningkatan pada tahun 2016 dan 2018, namun mengalami penurunan pada tahun 2015 dan 2017.

Sedangkan untuk belanja langsung mengalami peningkatan pada tahun 2016 dan 2017, namun mengalami penurunan pada tahun 2015 dan 2018. Tetapi apabila dibandingkan skala nominal PAD terhadap Dana Perimbangan sangat jauh besarnya. Begitu juga skala nominal PAD dengan belanja langsung sangat jauh berbeda besarnya. Dengan demikian dapat diartikan untuk nominal PAD saja, untuk melakukan belanja khususnya belanja langsung Pemerintah Kota Tanjungpinang belum mencukupi untuk mendanainya. Sehingga Pemerintah Kota Tanjungpinang masih bergantung dari dana dari pusat berupa dana perimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Kota Tanjungpinang”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Tanjungpinang?
2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Kota Tanjungpinang?
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Kota Tanjungpinang?

### **1.3 Batasan Masalah**

Untuk menghindari perluasan masalah dan lebih terfokus terhadap pembahasan masalah yang akan diteliti, maka penulis membatasi masalah dengan mengangkat Pendapatan Asli Daerah dengan komponennya (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah), Dana Perimbangan dengan komponennya (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus) dan Belanja Langsung. Dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Belanja Langsung untuk meneliti pengaruhnya yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran Kota Tanjungpinang dengan periode penelitian dari tahun 2007 sampai dengan 2018.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penulis dapat menguraikan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Kota Tanjungpinang
2. Untuk mengetahui apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap belanja Belanja Langsung pada Pemerintah Kota Tanjungpinang.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

#### **1.5.1 Kegunaan Ilmiah**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi untuk penelitian-penelitian sejenis selanjutnya.

#### 1.5.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi :

1. Bagi Pemerintah Kota Tanjungpinang, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat melihat pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja langsung di Pemerintah Kota Tanjungpinang. Disamping itu juga dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan Pemerintah Kota Tanjungpinang sebagai acuan dalam membuat kebijakan dimasa yang akan datang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan penggunaan dana yang bersumber dari dari pusat dengan sebaik-baiknya guna membiayai pembangunan untuk pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap belanja langsung di pemerintah Kota Tanjungpinang.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembahasan, peneliti membagi ke dalam beberapa bab. Adapun Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini diuraikan mengenai pendahuluan penelitian yang mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian secara ilmiah dan praktis serta sistematika penulisan penelitian secara keseluruhan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini dipaparkan tinjauan teori, baik teori dasar maupun teori penunjang yang berhubungan dengan pokok permasalahan dan digunakan sebagai pedoman atau landasan konseptual dalam pemecahan masalah. Teori-teori ini diambil dari berbagai sumber literatur dan buku rujukan yang saling mendukung untuk memecahkan permasalahan dan akhirnya mencapai tujuan penelitian kerangka pemikiran dan hipotesis sebagai acuan di dalam melakukan penelitian.

## **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini dibahas gambaran umum yang terdiri dari jenis data, jenis penelitian, teknik penentuan metode pengumpulan data, definisi operasional variabel penelitian, teknik pengolahan dan dilakukan analisis data dan jadwal penelitian.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini meliputi gambaran umum objek penelitian, penyajian data, analisis data dari pengujian SPSS beserta hasil penelitian serta pembahasannya.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang diambil dari hasil pembahasan dan saran-saran yang dianggap perlu dalam penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teori**

##### **2.1.1 Penganggaran Sektor Publik**

Kegiatan ataupun program yang telah direncanakan pada pemerintahan baik pusat maupun daerah harus disusun keuangannya dalam bentuk anggaran. Bagi organisasi sektor publik seperti pemerintah, anggaran tidak hanya sebuah rencana tahunan, tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya. Dalam penyusunan anggaran, tentunya diperlukan perhitungan yang cermat dan teliti dengan menggunakan sistem perhitungan akuntansi yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Sistem pembukuan disusun berdasarkan pemasukan, pengeluaran, utang-piutang negara, dan sebagainya.

Definisi menurut (Mahmudi, 2011) Penganggaran sektor publik merupakan *blue print* organisasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta masa depan yang akan diwujudkan.

Menurut (Mahsun & Sulistiyowati, 2013) Penganggaran sektor publik dalam organisasi sektor publik merupakan aktivitas yang penting karena berkaitan dengan proses penentuan alokasi dana untuk setiap program maupun aktivitas.

Menurut (V Wiratna Sujarweni, 2015) Anggaran sektor publik adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen organisasi untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan organisasi kepada pihak pemilik

organisasi atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang publik.

Menurut (Nordiawan, Deddi, Putra, Iswayudi Sondi & Rahmawati, 2009) Anggaran pemerintah/sector publik merupakan salah satu implementasi ilmu akuntansi manajemen yang menjadi alat penting dalam melakukan alokasi sumber daya di pemerintahan.

Dari pengertian menurut beberapa ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Penganggaran Sektor Publik adalah aktivitas penting atas penentuan alokasi dana untuk rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta masa depan yang akan diwujudkan.

### **2.1.2 Fungsi Penganggaran Sektor Publik**

Menurut (Mardiasmo, 2018) Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama yaitu :

#### **1. Anggaran Sebagai Alat Perencanaan (*Planning Tool*)**

Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah berupa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah yang dapat dilakukan tersebut.

#### **2. Anggaran Sebagai Alat Pengendalian (*Control Tool*)**

Anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan-pemborosan pengeluaran. Anggaran sektor publik dapat digunakan untuk mengendalikan (membatasi kekuasaan) eksekutif. Anggaran sebagai



pengendalian manajerial, anggaran sektor publik digunakan untuk meyakinkan bahwa pemerintah mempunyai uang yang cukup untuk memenuhi kewajibannya dan untuk memberikan informasi dan meyakinkan legislatif bahwa pemerintah bekerja secara efisien, tanpa ada korupsi dan pemborosan.

3. Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal (*Fiskal Tool*)

Anggaran digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi – prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi dan mengkoordinasi kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4. Anggaran Sebagai Alat Politik (*Political Tool*)

Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Anggaran bukan sekedar masalah teknis akan tetapi lebih merupakan politik (*political tool*). Oleh karena itu, pembuatan anggaran publik membutuhkan *political skill, coalition building*, keahlian bernegosiasi dan pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan publik oleh para manajer publik.

5. Anggaran Modal/Investasi (*Capital/Investmen Budget*)

Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabotan, dan sebagainya. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman. Belanja investasi/modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintahan dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya.

### **2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)**

#### **2.1.3.1 Pengertian APBN**

Menurut (Republik Indonesia, 2016) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Menurut (Mahsun & Sulistiyowati, 2013) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah daftar yang memuat rincian penerimaan negara dan pengeluaran/belanja negara selama satu tahun yang ditetapkan dengan undang-undang untuk masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (disebut tahun fiskal).

Menurut (Sri Rahayu, 2014) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah suatu daftar yang memuat rincian pendapatan dan pengeluaran negara untuk waktu tertentu, biasanya satu tahun.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat di ambil kesimpulan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah daftar yang memuat rencana keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran negara selama satu tahun

yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang ditetapkan dengan undang-undang.

Anggaran Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki tujuan sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat.

### **2.1.3.2 Fungsi APBN**

Menurut (Sri Rahayu, 2014) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi alokasi

Anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

2. Fungsi Distribusi

APBN tidak selalu harus didistribusikan untuk kepentingan umum, melainkan dapat pula didistribusikan dalam bentuk dana subsidi dan dana pension. Pengeluaran ini disebut *Transfer payment* yang dapat membatalkan pembiayaan ke salah satu sektor, kemudian dipindahkan ke sektor lain.

3. Fungsi Stabilisasi

Anggaran negara menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

4. Fungsi Otorisasi

Anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

5. Fungsi Perencanaan

Anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan

6. Fungsi Pengawasan

Anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

### **2.1.3.3 Struktur APBN**

Menurut (Sujarweni, 2015) struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdiri atas :

1. Pendapatan negara, terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak
2. Belanja Negara terdiri dari belanja daerah pemerintah pusat dan belanja daerah meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus.
3. Pembiayaan terdiri dari pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri. Pembiayaan Dalam Negeri, meliputi Pembiayaan Perbankan, Privatisasi, Surat Utang Negara, serta penyertaan modal Negara. Pembiayaan Luar Negeri meliputi Penarikan Pinjaman Luar Negeri, terdiri atas Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek, Pembayaran Cicilan Rokok Utang Luar Negeri, terdiri atas Jatuh Tempo dan Moratorium (otorisasi legal untuk menunda pembayaran utang atau kewajiban tertentu selama batas waktu tertentu).

## **2.1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

### **2.1.4.1 Pengertian APBD**

Menurut (Republik Indonesia, 2016) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menurut (Mahsun & Sulistiyowati, 2013) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Menurut (Sri Rahayu, 2014) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/belanja daerah selama satu tahun yang ditetapkan dengan peraturan daerah (perda) untuk masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan Pemerintahan Daerah yang memuat rincian penerimaan dan pengeluaran/belanja daerah selama satu tahun dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki tujuan sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran dalam melaksanakan kegiatan daerah untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi masyarakat daerah.

#### **2.1.4.2 Fungsi APBD**

Menurut (Sri Rahayu, 2014) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi alokasi dana dalam arti APBD diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
2. Fungsi Distribusi dalam memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan
3. Fungsi Stabilisasi ekonomi berarti APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.
4. Fungsi Otorisasi berarti APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
5. Fungsi Perencanaan, yaitu APBD menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
6. Fungsi Pengawasan, yaitu APBD berarti menjadi pedoman untuk menilai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
7. Fungsi Penyelenggaraan Pemerintah (Pelayanan, Pembangunan dan Pemberdayaan).
8. Dan lain-lain

#### **2.1.4.3 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Menurut (Sujarweni, 2015) struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri atas :

1. Anggaran pendapatan, terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain. Bagian Dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pendapatan lain-lain yang sah seperti dana hibah atau dana darurat
2. Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.
3. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

### **2.1.5 Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah**

Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah salah satunya dalam bentuk hubungan keuangan yang dalam arti sempit sering juga disebut sebagai perimbangan keuangan pusat dan daerah. Hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah menjadi sangat penting karena dalam pelaksanaannya pemerintah pusat harus memperlakukan secara adil dalam pembagian sumber-sumber keuangan antara pusat dan daerah agar pemerataan dapat dirasakan oleh daerah dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi antar daerah. APBN dan APBD merupakan inti dari keuangan (Akuntansi) pemerintahan karena anggaran merupakan informasi keuangan paling penting yang dihasilkan oleh pemerintah.

(C.S.T. Kansil & Christine S.T Kansil, 2014) Hubungan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) erat sekali. Sebagai alasan dapatlah dikemukakan bahwa :

1. Tahun anggaran daerah sama dengan tahun anggaran negara;
2. Daerah baru dapat menyusun APBD sesudah mengetahui besarnya subsidi yang akan diterima dari Pemerintah Pusat.

Dalam kenyataan, proses penyusunan, pengesahan, dan pengundangan APBD terlambat beberapa bulan sesudah tahun anggaran dimulai. Namun, APBD harus sudah dapat diselesaikan dalam waktu paling lambat tiga bulan setelah APBN ditetapkan. Oleh karena itu persiapan-persiapan dalam penyusunan APBN maupun APBD harus sudah dimulai sebelumnya. Dengan persiapan yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Menurut (Mahmudi, 2011) Hubungan yang saling berkaitan dalam hal keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan terjadi dalam bentuk :

1. Pengalokasian transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri atas dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian.
2. Pemberian pinjaman dan/atau hibah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.
3. Pemberian pinjaman/hibah/penyertaan modal oleh pemerintah pusat kepada perusahaan daerah atau sebaliknya pemberian pinjaman/hibah oleh perusahaan daerah kepada pemerintah pusat.
4. Pemberian pinjaman/hibah oleh perusahaan negara kepada pemerintah daerah.



## **2.1.6 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

### **2.1.6.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

(Mahmudi, 2010) Tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal salah satunya adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Dengan peningkatan kemandirian suatu daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah. Setiap daerah memiliki wewenang dan kewajiban untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri dengan melakukan segala upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan demikian pemerintah daerah dapat melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang semakin mantap demi kesejahteraan masyarakatnya.

Definisi menurut (Republik Indonesia, 2016), dalam Undang-Undang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut (Yani, 2009) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Menurut (BPS Kota Tanjungpinang, 2018), dalam Kota Tanjungpinang Dalam Angka bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang di peroleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan/pendapatan yang diperoleh oleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tujuan memberikan kekuasaan daerah dalam menggali pendanaan untuk membiayai kegiatannya.

Besarnya Pendapatan Asli Daerah didukung dengan meningkatnya penerimaan yang dihasilkan dari daerah masing-masing. Dimana komponen dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.

#### **2.1.6.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Ada beberapa sumber yang akan menghasilkan Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

1. Pajak Daerah, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Pajak Daerah meliputi :

- a. Pajak Hotel
  - b. Pajak Restoran
  - c. Pajak Hiburan
  - d. Pajak Reklame
  - e. Pajak Penerangan Jalan
  - f. Pajak Parkir
  - g. Pajak Air Tanah
  - h. Pajak Sarang Burung Walet
  - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
  - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
  - l. dst
2. Retribusi daerah, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- Retribusi daerah meliputi:
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
  - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
  - d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
  - e. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
  - f. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
  - g. dst

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD, yang meliputi Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD ini bersama sektor swasta atau Asosiasi Pengusaha daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi daerah sehingga dapat menunjang kemandirian daerah dalam pembangunan perekonomian daerah.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah, merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah meliputi :

- a. Hasil penjualan asset lainnya
- b. Penerimaan Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Pendapatan Denda Pajak
- e. Pendapatan Denda Retribusi
- f. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
- g. dst

## **2.1.7 Dana Perimbangan**

### **2.1.7.1 Pengertian Dana Perimbangan**

Menurut (Republik Indonesia, 2016) dalam Undang-undang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan adalah dana

yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut (Halim & Iqbal, 2012) Dana Perimbangan adalah pendanaan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dana perimbangan adalah dana yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan atau program yang bersumber dari pendapatan APBN dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

#### **2.1.7.2 Dana Bagi Hasil**

##### **1. Pengertian Dana Bagi Hasil**

Menurut (Nordiawan, Deddi, Putra, Iswayudi Sondi & Rahmawati, 2009) Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan angka persentase tertentu didasarkan atas daerah penghasil untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut (Halim & Iqbal, 2012) Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN (pajak dan sumber daya alam) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil adalah dana yang digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah yang

bersumber dari pendapatan APBN dengan persentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

## **2 Sumber Dana Bagi Hasil**

Pembagian dan mekanisme perhitungan Dana Bagi Hasil, baik Pajak maupun Sumber Daya Alam diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 dan PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak, terdiri atas :

- a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan
- c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan PPh Pasal 21

Dana Bagi Hasil bersumber dari sumber daya alam, berasal dari:

- a. Kehutanan
- b. Pertambangan umum
- c. Perikanan
- d. Pertambangan minyak bumi

### **2.1.7.3 Dana Alokasi Umum (DAU)**

#### **1. Pengertian Dana Alokasi Umum (DAU)**

Menurut (Yani, 2009) Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum dimaksud untuk mengurangi

ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

## **2. Ketentuan Dana Alokasi Umum (DAU)**

(Nordawan, Deddi, Putra, Iswayudi Sondi & Rahmawati, 2009) Untuk jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum ditetapkan dalam APBN, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto. Pendapatan dalam negeri netto adalah penerimaan negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak setelah dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagihasikan kepada daerah.
- b. Proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) antara provinsi dan Kabupaten/Kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan Kabupaten/Kota.
- c. Jika penentuan proporsi tersebut belum dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) antara provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan dengan imbang sebesar 10% dan 90% dari jumlah keseluruhan dana alokasi umum.

## **3. Penetapan Dana Alokasi Umum (DAU)**

(Yani, 2009) Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) berasal dari celah fiskal ditambah alokasi dasar. Dimana

celah fiskal adalah selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal, sedangkan alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai Negeri Sipil Daerah. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum (antara lain kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan). Kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana bagi hasil.

Kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum (antara lain kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan). Adapun kebutuhan pendanaan tersebut, diukur secara berturut-turut berdasarkan:

a. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan akan penyediaan layanan publik di setiap daerah.

b. Luas wilayah

Luas wilayah merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana per satuan wilayah. Luas wilayah ini merupakan luas wilayah daratan.

c. Indeks kemahalan konstruksi

Indeks kemahalan konstruksi merupakan cerminan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar daerah.

d. Produk domestik regional bruto perkapita



Produk domestik regional bruto perkapita merupakan cerminan potensi dan aktivitas perekonomian suatu daerah yang dihitung berdasarkan total seluruh *output* produksi kotor dalam suatu wilayah.

e. Indeks pembangunan manusia

Indeks pembangunan manusia merupakan variabel yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk atas layanan dasar dasar di bidang pendidikan dan kesehatan.

Dana Alokasi Umum (DAU) atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah kab/kota dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) seluruh daerah Kabupaten/Kota.

#### **2.1.7.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)**

##### **1. Pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Menurut (Yani, 2009) Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana alokasi khusus dimaksud untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasara pelayananan dasar masyarakat.

Daerah tertentu yang dapat memperoleh alokasi Dana Alokasi Khusus ditentukan berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam rencana kerja pemerintah tahun anggaran bersangkutan. Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur (jalan, irigasi, dan air bersih), kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, serta lingkungan.

## **2. Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)**

(Nordawan, Deddi, Putra, Iswiyudi Sondi & Rahmawati, 2009) Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) harus dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikeluarkan oleh Menteri teknis.

Ada beberapa kewajiban yang melekat pada daerah penerima Dana Alokasi Khusus DAK, yaitu:

- a. Daerah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK-nya di dalam APBD
- b. Kecuali untuk daerah tertentu dengan kemampuan keuangan tertentu, daerah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) wajib menganggarkan Dana Pendampingan dalam APBD sekurang-kurangnya 10% dari besaran alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterimanya. Dana pendamping tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat kegiatan fisik.
- c. Kepala daerah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) harus menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan

penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada Menteri Keuangan, Menteri teknis, dan Menteri Dalam Negeri, yang penyampaiannya dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

### **3. Penetapan Dana Alokasi Khusus (DAK)**

(Nordriawan, Deddi, Putra, Iswayudi Sondi & Rahmawati, 2009) Adapun perhitungan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dilakukan melalui dua tahapan, yaitu :

- a. Penentuan daerah tertentu yang menerima Dana Alokasi Khusus (DAK), daerah tersebut harus memenuhi.
- b. Penentuan besaran alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) masing-masing daerah, yang ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Kriteria umum adalah perumusan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja pegawai negeri sipil. Kemampuan keuangan daerah daerah dihitung melalui indeks fiskal neto, dan daerah yang ditetapkan setiap tahun.

Kriteria khusus dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah serta berdasarkan indeks kewilayahan oleh Menteri keuangan.

Kriteria teknis disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Kriteria teknis tersebut dirumuskan melalui indeks teknis oleh menteri terkait.

## **2.1.8 Belanja Daerah**

### **2.1.8.1 Pengertian Belanja Daerah**

Menurut (Sri Rahayu, 2014) Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Atau belanja daerah dapat diartikan sebagai semua pengeluaran kas daerah.

Menurut (Republik Indonesia, 2016), dalam Undang-Undang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Menurut (Anggota IKAPI, 2014) Belanja Daerah merupakan belanja penyelenggaraan urusan wajib yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitasi umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Dari pengertian-pengertian belanja daerah dari beberapa versi di atas, dapat disimpulkan bahwa Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas/semua kewajiban pemerintah daerah yang mengurangi nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan untuk penyelenggaraan urusan wajib yang diprioritas untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitasi umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

### **2.1.8.2 Belanja Tidak Langsung**

Menurut (Nordiawan, Deddi, Putra, Iswayudi Sondi & Rahmawati, 2009) Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Menurut (Halim & Kusufi, 2012) Belanja tidak langsung, yaitu belanja yang tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Menurut (Halim & Iqbal, 2012) Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak dipengaruhi oleh adanya program atau kegiatan.

Dari pengertian-pengertian di atas, menurut beberapa para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa Belanja Tidak Langsung adalah pengeluaran yang digunakan tidak terkait langsung dengan kegiatan/program pemerintahan yang dijalankan.

Jenis belanja tidak langsung terdiri atas :

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Bunga
3. Belanja Subsidi
4. Belanja Hibah
5. Belanja Bantuan Keuangan
6. Belanja Bantuan Sosial
7. Belanja Tidak Terduga

### **2.1.8.3 Belanja Langsung**

Menurut (Halim & Iqbal, 2012) Belanja langsung adalah belanja yang dipengaruhi oleh adanya program atau kegiatan yang direncanakan.

Menurut (Nordiawan, Deddi, Putra, Iswayudi Sondi & Rahmawati, 2009) merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Menurut (Halim & Kusufi, 2012) Belanja langsung, yaitu belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan pemerintah daerah.

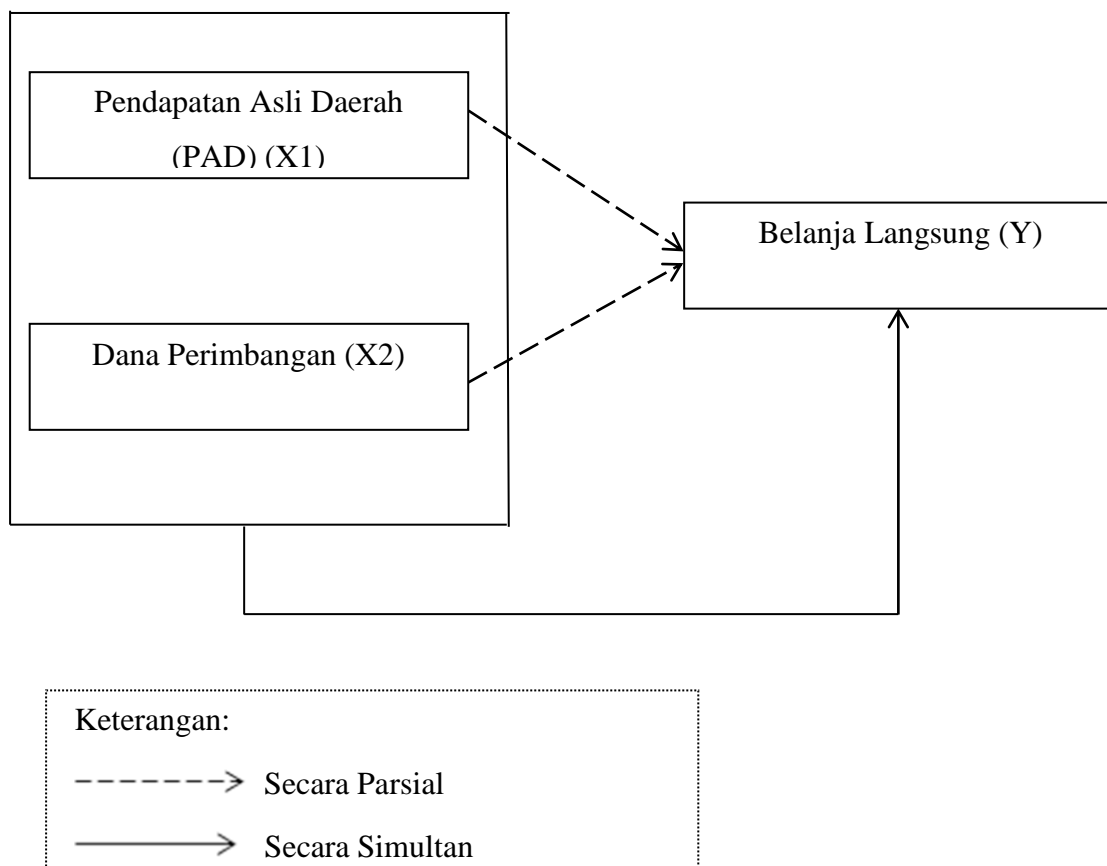
Dari pengertian beberapa ahli di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa belanja langsung belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program atau kegiatan yang direncanakan.

Jenis belanja langsung terdiri atas :

1. Belanja Pegawai, untuk pengeluaran honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
2. Belanja Barang dan Jasa, untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
3. Belanja Modal, untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

(Purwanto, 2011) Kerangka berpikir adalah argument dalam merumuskan hipotesis yang merupakan jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah yang diajukan. Kerangka pemikiran mengenai hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.1**

*Sumber : Konsep yang dikembangkan untuk penelitian 2019*

### 2.3. Hipotesis Penelitian

Menurut pendapat (Sugiono, 2011) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, rumusan masalah penelitian tersebut telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan hanya didasarkan pada teori relevan, belum didasarkan pada bukti-bukti empiris yang didapat melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dikatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli

Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap belanja langsung pada Pemerintah Kota Tanjungpinang.

### **2.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Langsung**

Menurut (BPS Kota Tanjungpinang, 2018), dalam Kota Tanjungpinang Dalam Angka bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang di peroleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pendapatan daerah setempat dalam memanfaatkan potensi yang ada bagi daerah untuk melaksanakan kegiatan/program pemerintahan yang tertuang dalam APBD. Sehingga untuk merealisasikan kegiatan tersebut dibutuhkan pengeluaran/belanja untuk mendanainya.

H1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja langsung di Pemerintah Kota Tanjungpinang

### **2.3.2 Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Langsung**

Menurut (Halim & Iqbal, 2012) Dana Perimbangan adalah pendanaan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat masih mendominasi pemerintah daerah sehingga dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah dalam arti pemerintah daerah



dapat mempengaruhi jumlah penerimaannya. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat menggunakannya dengan sebaik-baiknya dan berusaha untuk mengoptimalkan dalam belanja langsung.

H2 : Dana Perimbangan berpengaruh terhadap belanja langsung di Pemerintah Kota Tanjungpinang

### **2.3.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Langsung**

Menurut (Yani, 2009) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Menurut (Republik Indonesia, 2016) dalam Undang-undang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan untuk mendanai kegiatan/program pemerintahan. Dan sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia masih memiliki tingkat ketergantungan keuangan yang tinggi terhadap pemerintah pusat dana untuk

pemekaran atau pemerataan suatu daerah (Mahmudi, 2010). Sumber pendapatan dari daerah dan pusat akan membantu pemerintah daerah dalam kegiatan daerah.

Sedangkan untuk pemekaran atau pemerataan suatu daerah, tentunya dana transfer dari pusat sangat dibutuhkan demi tercapainya kesejahteraan rakyat dan peningkatan pelayanan umum. Sehingga untuk mendanai kebutuhan itu, suatu daerah harus dapat menggunakan potensi yang ada dari daerah itu sendiri berupa pendapatan asli daerah dan tentunya demi kemajuan daerahnya tidak terlepas dari bantuan dana dari pusat yang berupa dana perimbangan.

H3 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap belanja langsung di Pemerintah Kota Tanjungpinang

#### **2.4 Penelitian Terdahulu**

(Yulsiati & Oktariani, 2010) Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil dari penelitian ini yaitu dengan uji Chow mendapatkan nilai F-statistik 1,475891 dengan nilai probabilitas penampang F sebesar 0,1869, ini berarti probabilitas penampang  $F > 0,05$  maka  $H_0$  diterima sehingga model data panel yang dapat digunakan adalah *Common Effect Model* (PLS). Hasil tabel analisis uji normalitas, menunjukkan bahwa jarque-Bera sebesar 1,127542 lebih kecil dari 2 dan nilai probabilitas 0,569059 lebih besar dari 0,05 yang berarti distribusi normal. Untuk analisis multikolinieritas menunjukkan bahwa korelasi antara variabel independen adalah pendapatan lokal, bagi hasil dan dana alokasi

umum. Antara variabel PAD dan DBH adalah 0,0696937, PAD dan DAU adalah 0,694382, DBH dan PAD adalah 0,076937, DBH dan DAU adalah -0,279503, DAU dan PAD adalah 0,6943821, DAU dan DBH -0,279503 lebih kecil dari 0,90 yang berarti tidak ada multikolinieritas. Untuk hasil uji heterokedastisitas diperoleh nilai koefisien variabel bebas PAD sebesar 0,972, DBH sebesar 0,0519 dan DAU sebesar 0,3132 ini berarti tidak signifikan  $> 0,05$ , sehingga tidak ada Heterokedastisitas. Analisis Regresi Linier Berganda menggunakan pendekatan *Common Effect Model* (PLS) didapatkan hasil persamaan sebagai berikut:  $BL = 120258.1 + 0,516960 * PAD + 0,659523 * DBH + 0,534160 * DAU + e$ . Berdasarkan persamaan tersebut, Konstanta 120258.1 menunjukkan bahwa jika tidak ada variabel independen (pendapatan lokal, bagi hasil dan dana alokasi umum) maka tingkat belanja langsung adalah 120258.1. Untuk  $\beta_1$  dari 0.516960 menunjukkan bahwa setiap tambahan 1% pendapatan asli daerah akan diikuti oleh peningkatan pengeluaran langsung sebesar 0,516960 dengan asumsi bahwa variabel lain tetap. Dan  $\beta_2$  dari 0,659523 menunjukkan bahwa setiap bagian pendapatan tambahan 1% akan diikuti oleh peningkatan pengeluaran langsung sama dengan 0,659523 dengan asumsi bahwa variabel lain tetap. Kemudian  $\beta_3$  dari 0,534160 menunjukkan bahwa setiap penambahan dana alokasi umum 1% akan diikuti oleh peningkatan pengeluaran langsung sebesar 0,534160 dengan asumsi variabel lain tetap. Dengan uji simultan (uji F) diketahui nilai F-statistik atau nilai Fhitung sebesar 105.5197 dengan nilai signifikan 0,000000. Ini menunjukkan bahwa  $F_{hitung} \geq F_{tabel}$  adalah 2,83 dan nilai signifikan  $F_{hitung} \leq F_{tabel}$  0,05. Nilai  $F_{tabel}$  diperoleh dengan istilah  $df(n_1) = k-1$  dan  $df(n_2) = nk$  di

mana  $df$  adalah kebebasan derajat,  $n$  adalah jumlah pengamatan, dan  $k$  adalah jumlah variabel independen dan dependen dengan probabilitas tingkat 0,05. dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian, variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Langsung.

(Simanjuntak, Subeki, Ferina, & Yusrianty, 2013) Melakukan Penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Flypaper dalam Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pengeluaran Daerah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Selatan. Adapun hasil penelitian ini yaitu berdasarkan uji asumsi klasik, model dalam penelitian ini lolos dari penyimpangan asumsi klasik bahwa model telah digunakan. Hasil analisis model regresi diperoleh persamaan regresi  $Y = 504540078828.894 + 0.259X_1 + 3.732X_2$ . Dari model tersebut, konstanta diperoleh 504.540.078.828.894. Nilai ini terjadi ketika besarnya  $X_1$  dan  $X_2$  adalah 0 (nol) ke  $Y$ . Ini berarti bahwa dalam tidak adanya Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah, ada variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini dicatat untuk pengeluaran sebesar Rp. 504.540.078.828.894. DAU memiliki koefisien regresi positif untuk 0259, itu mengukur bahwa jika variabel DAU perubahan sebesar 1%, maka akan ada peningkatan Pengeluaran untuk 0259 (25,9%) dengan asumsi variabel lain dalam keadaan konstan. PAD memiliki koefisien regresi positif untuk 3732, artinya ada peningkatan pendapatan variabel sebesar 1%, lalu akan ada peningkatan pengeluaran untuk 3732 (373,2%) dengan asumsi variabel lain dalam keadaan konstan. Untuk uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa Rvalue dari R adalah 0,702 (70,2%), itu berarti bahwa

variabel X1 dan X2 memiliki hubungan dekat dengan variabel Y. Nilai R mendekati 1 atau di atas 50% yang menunjukkan bahwa variabel dependen memiliki hubungan dengan variabel independen. Dalam hal ini, korelasi antara PAD dan DAU untuk pengeluaran daerah di kabupaten / kota di Sumatera Selatan oleh 70,2%. Nilai R Square atau koefisien determinasi adalah 0,493 (49,3%), artinya persentase 49,3% variabel X1 dan X2 mempengaruhi Y. Nilai mendekati 1 berarti bahwa variabel independen menyediakan hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi dalam variabel dependen. Dalam hal ini, nilai R<sup>2</sup> untuk 0,493 menunjukkan bahwa kontribusi variabel DAU dan PAD terhadap pengeluaran sebesar 49,3%, sedangkan 50,7% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak berpartisipasi dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil uji signifikan simultan (uji F), nilai data F adalah 27.670 dengan signifikansi 0000 (<0,05). Oleh karena itu dibandingkan dengan F tabel, maka akan diperoleh F tabel sebesar 3159 sebesar 27.670 lalu F hitung > F tabel. Artinya H<sub>0</sub> ditolak, karena F hitung > F tabel (27 670 > 3159) dan level signifikansi F dalam model ini adalah 0000 > 0,05. Apalagi H<sub>0</sub> menyatakan DAU dan PAD bersama-sama tidak berpengaruh terhadap penurunan belanja daerah. Dengan kata lain, DAU dan PAD secara bersama-sama mempengaruhi pengeluaran daerah. Untuk menguji hipotesis pertama penelitian ini, menggunakan uji statistik F. Diperoleh bahwa hipotesis alternatif DAU dan PAD berpengaruh positif terhadap pengeluaran daerah. Hipotesis pertama dapat diterima. Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), tingkat signifikansi DAU adalah 0,372 yang lebih besar dari nilai 0,05. Lebih jauh, DAU tidak berpengaruh pada pengeluaran daerah. Dengan demikian,

hipotesis nol bahwa DAU tidak berpengaruh positif pengeluaran daerah diterima. Hipotesis alternatif kedua ditolak. Namun untuk PAD, nilainya 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, itu artinya PAD sebagian mempengaruhi wilayah pengeluaran daerah. Jadi, hipotesis nol bahwa PAD tidak berpengaruh pada pengeluaran daerah ditolak, hipotesis alternatif ketiga adalah diterima. Dalam model regresi, DAU memiliki signifikansi positif untuk 0,259 dan PAD memiliki positif koefisien untuk 3,732. Untuk kontribusi variabel DAU, jika ada perubahan 1%, Meningkatkan hanya berkontribusi pengeluaran untuk 0259 (25,9%). Berbeda dengan kasus variabel PAD meningkat sebesar 1%, itu akan menjadi peningkatan pengeluaran untuk 3.732 (372.2%). Itu menunjukkan bahwa pengaruh DAU terhadap pengeluaran lebih kecil daripada pengaruhnya terhadap pengeluaran daerah. Ini berarti bahwa hipotesis keempat ditolak. Untuk koefisien DAU adalah 1,077, lebih kecil dari koefisien PAD 1.710. PAD memiliki tingkat signifikansi 0,05 yang kurang dari 0,019. Dan koefisien PAD lebih besar dari 21.794 koefisien DAU adalah 0,038, dengan tingkat signifikansi PAD lebih kecil dari 0,05, yaitu 0000 (PAD signifikan). Ini menunjukkan bahwa untuk flypaper PAD daerah rendah tidak terjadi. DAU tidak lagi mampu menstimulasi daerah untuk melakukan pengeluaran daerah dibandingkan PAD sendiri. Dengan kata lain, untuk area PAD rendah, sejumlah besar pendapatan berkontribusi pada pengeluaran daerah. Dalam hal ini, hipotesis bahwa flypaper terjadi di berbagai daerah PAD tidak diterima, artinya, hipotesis alternatif kelima ditolak.

(Ernayani, 2017) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana

Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah Studi Kasus pada 14 Kab/Kota di Kalimantan Timur periode 2009-2013. Hasil penelitian untuk uji asumsi klasik bahwa analisis regresi linier berganda layak digunakan karena tidak menyimpang dari asumsi klasik. Dan dapat disimpulkan hasil pengujian sebagai berikut : (1) Pendapatan Asli daerah memiliki t hitung sebesar 3,62 dengan taraf signifikan 0,01 dan t tabel 2,00 maka disimpulkan  $H_0$  ditolak/ $H_a$  diterima, artinya hipotesis diterima bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja daerah. (2) Dana Alokasi umum memiliki t hitung sebesar 3,46 dengan taraf signifikan 0,01 dan t tabel 2,00 maka disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak/ $H_a$  diterima, artinya hipotesis diterima bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja daerah. (3) Dana alokasi khusus memiliki t hitung sebesar 0,55 dan t tabel sebesar 2,00 maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima/ $H_a$  ditolak. Dengan taraf signifikan 0,58 juga menunjukkan bahwa  $H_0$  diterima/ $H_a$  ditolak, artinya hipotesis ditolak disebabkan karena dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. (4) Dana Bagi Hasil memiliki t hitung sebesar 17,3 dengan taraf signifikan 0,00 dan t tabel sebesar 2,00 maka disimpulkan  $H_0$  ditolak/ $H_a$  diterima, artinya hipotesis diterima bahwa dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja daerah. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa dari empat variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil, terdapat satu variabel yang secara parsial tidak signifikan mempengaruhi variabel Belanja Daerah dimana  $p = 0,58 > 0,05$ . Dengan penjelasan bahwa pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah dapat dilihat dari koefisien regresinya. Dalam persamaan regresi

berganda tampak bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah (Y). Secara parsial, jika ada peningkatan skor Pendapatan Asli Daerah (X1) sebesar satu satuan, maka pada rata-ratanya akan meningkatkan skor Belanja Daerah sebesar koefisien regresi  $b_1 = 2,098$  dengan asumsi variabel bebas Dana Alokasi Umum (X2), Dana Alokasi Khusus (X3) dan Dana Bagi Hasil (X4) dalam keadaan tetap. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini terbukti, yaitu Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Pengaruh variabel Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah dapat dilihat dari koefisien regresinya. Dalam persamaan regresi berganda tampak bahwa variabel Dana Alokasi Umum (X2) memiliki hubungan yang positif terhadap Belanja Daerah. Hal ini berarti setiap ada peningkatan Pendapatan Asli Daerah maka belanja daerah juga akan mengalami peningkatan. Secara parsial, jika ada peningkatan skor Dana Alokasi Umum (X2) sebesar satu, maka pada rata-ratanya akan meningkatkan skor Belanja Daerah sebesar koefisien regresi  $b_2 = 1,228$  dengan asumsi variabel bebas Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Khusus (X3), Dana Bagi Hasil (X4) dalam keadaan tetap. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah dapat dilihat dari koefisien regresinya. Dalam persamaan regresi berganda tampak bahwa variabel Dana Alokasi Khusus (X3), memiliki hubungan yang positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Daerah. Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini tidak terbukti, yaitu Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah, walaupun arahnya positif. Dengan Pengujian Simultan



(Uji-F) menunjukkan hasil uji F sebesar 118,597 dengan taraf signifikansi sebesar 0,00. Karena nilai probabilitas (0,00) lebih kecil dari 0,05 dapat dikatakan bahwa keempat variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), Dana Alokasi Khusus (X3), Dana Bagi Hasil (X4) secara bersama-sama mempengaruhi. Hal ini berarti bahwa hipotesis yang diajukan terbukti dan dapat diterima kebenarannya.

(Setiyawati, 2014) Melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung Di Propinsi Jawa Tengah. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan berdasarkan hasil uji normalitas dengan uji kolmogorov-Smirnov dimana diperoleh angka probabilitas (*Asymp. Sig. (2-tailed)*) sebesar 0.913. Dengan menggunakan taraf signifikansi *alpha* 5% atau (0.05), maka diketahui nilai probabilitas 0, lebih besar dari 0.05 ( $0.913 > 0.05$ ), maka  $H_0$  diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dari grafik scatterplots terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Dalam hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi pengaruh terhadap Belanja Langsung berdasarkan masukan variabel independen DAU, DAK, dan PAD. Hasil perhitungan nilai tolerance menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0.10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu

variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi. Dari hasil uji autokorelasi dapat diketahui bahwa nilai DW sebesar 2.109, dan akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel 143 (n) dan jumlah variabel 4 (k=4). Pada tabel Durbin Watson didapatkan nilai batas bawah (DL) sebesar 1.879, dengan batas atas (DU) sebesar 1.768. Hasil uji Durbin Watson statistik didapat sebesar 2.109 yang berada di area  $dU < DW < 4 - dU$ , maka tidak terjadi autokorelasi. Dari hasil pengujian regresi model berganda didapat nilai Adjusted R square adalah 0.970, hal ini berarti 97% variasi Belanja Langsung dapat dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel independen DAU, DAK, dan PAD. Sedangkan sisanya ( $100\% - 97\% = 3\%$ ) dijelaskan oleh sebab yang lain diluar model. Dari uji ANOVA atau F test didapat nilai F hitung sebesar 1494.707 dengan probabilitas 0.000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0.05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Belanja Langsung atau dapat dikatakan bahwa DAU, DAK, dan PAD secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Langsung. Dari Uji t (Parsial) untuk variabel PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Langsung, hal ini dapat dilihat dari probabilitas signifikansi untuk PAD lebih kecil dari 0,05. Nilai PAD yang didapat dari pengujian adalah sebesar  $0,000 < 0,05$ , dan dapat dikatakan secara parsial PAD (X3) berpengaruh terhadap Belanja Langsung (Y) dimana  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Untuk analisis regresi linier berganda dibuat persamaan model regresi sebagai berikut:  $BLJ\ LGSG = 2863092926 + 0.400 (DAU) - 0.598 (DAK) + 1.195 (PAD)$ . Interpretasi dari persamaan regresi diatas adalah: (a)

Konstanta sebesar 2.863.092.926 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan, maka didapatkan rata-rata belanja langsung sebesar 2.863.092.926.; (b) Koefisien DAU sejumlah 0.400 menggambarkan koefisien regresi ini adalah positif, artinya setiap mengalami kenaikan/penambahan DAU sebesar Rp. 1.000.000,00 akan mendorong tingkat pertumbuhan belanja langsung sebesar Rp. 400.000,00; (c) Koefisien DAK sejumlah 0.598 menggambarkan koefisien regresi ini adalah negatif, artinya setiap mengalami kenaikan/penambahan sebesar Rp. 1.000.000,00 akan mendorong penurunan tingkat pertumbuhan belanja langsung sebesar Rp. 598.000,00; (d) Koefisien PAD sejumlah 1,195 menggambarkan koefisien regresi ini adalah positif, artinya setiap mengalami kenaikan/penambahan sebesar Rp. 1.000.000,00 akan mendorong tingkat pertumbuhan belanja langsung sebesar Rp. 1.195.000,00.

(Surya Hamdani, 2014) Melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Timur. Hasil dari penelitian ini dengan hasil pengolahan data Dana Alokasi Umum yang diterima oleh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2007-2012 memiliki rata-rata penerimaan DAU sebesar Rp. 230.816.826.587,- dengan nilai standar deviasi DAU sebesar Rp 133.549.920.000,-. Karena nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata penerimaan Dana Alokasi Umum tahun 2007-2012 maka dapat dikatakan bahwa data terdistribusi secara normal. Hasil pengolahan data Dana Alokasi Umum yang diterima oleh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2007-2012 memiliki rata-rata penerimaan PAD

selama enam tahun (2007-2012) sebesar Rp. 92.955.145.723,- dengan nilai standar deviasi sebesar Rp. 52.245.980.000,- lebih kecil dari nilai rata-rata (mean) Rp. 92.955.145.723,- yang menunjukkan bahwa distribusi data cenderung normal. Hasil pengolahan data Dana Alokasi Umum yang diterima oleh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2007-2012 memiliki rata-rata Belanja Daerah selama enam tahun (2007-2012) sebesar Rp. 1.262.781.132.290,- dan memiliki nilai standar deviasi sebesar Rp. 418.434.622.833,-. Nilai tersebut jauh lebih kecil dari nilai rata-rata (mean) Rp. 1.262.781.132.290,- yang menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal. Hasil perhitungan statistik uji F sebesar 13.148 dengan probabilitas 0,000. karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 yang berarti secara simultan seluruh variabel independen yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu Belanja Daerah (BD). Dengan demikian model regresi ini dapat menjelaskan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa dua variabel yang dimasukkan dalam model signifikan mempengaruhi Belanja Daerah. Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) menunjukkan tingkat signifikansi masing-masing 0,000 dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tingkat signifikansi 0,043. Ini menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. artinya baik variabel DAU maupun variabel PAD secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Hasil nilai adjust R-Square dari regresi yang digunakan untuk mengetahui besarnya struktur belanja daerah yang dipengaruhi oleh variabel-variabel

bebasnya, menunjukkan bahwa koefisien determinasi yang ditunjukkan oleh nilai adjust R-Square sebesar 0,314 hal ini berarti bahwa belanja daerah dapat dijelaskan oleh kedua variabel DAU dan PAD sebesar 31,4% sedangkan sisanya 68,6% (100%-31,4%) dijelaskan oleh sebab lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil uji statistik parameter individual (uji t) dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Belanja Daerah (BD). Hasil output regresi tersebut menunjukkan bahwa angka signifikansi variabel Dana Alokasi Umum adalah 0,000. Nilai tersebut jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi yang disyaratkan sebesar 0,05 atau 5% sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum secara individual berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Dengan demikian hipotesis 1 diterima. Berdasarkan hasil uji statistik parameter individual (uji t) secara parsial variabel independen Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Belanja Daerah (BD). Hasil output regresi tersebut menunjukkan bahwa angka signifikansi variabel Pendapatan Asli Daerah adalah 0,043. Nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah secara individual berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Dengan demikian hipotesis 2 diterima. walaupun kedua variabel baik Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Namun jika dilihat dari hasil output SPSS terlihat bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) sangat signifikan mempengaruhi Belanja Daerah dengan tingkat signifikansi 0,000 sedangkan

Pendapatan Asli Daerah juga mempengaruhi Belanja Daerah secara signifikan dengan tingkat signifikansi 0,043 artinya bahwa walaupun kedua variabel yaitu DAU dan PAD sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, Namun jika melihat masing-masing variabel maka DAU yang lebih signifikan mempengaruhi Belanja Daerah dari Pada PAD yang mempengaruhi Belanja Daerah.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif, karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistic (Sugiono, 2016).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen / variabel bebas (pendapatan asli daerah dan dana perimbangan) terhadap variabel dependen / variabel terikat yaitu (belanja langsung).

#### **3.2 Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder.

##### **3.2.1 Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui pihak kedua (biasanya diperoleh melalui badan/instansi yang bergerak dalam proses pengumpulan data, baik oleh instansi pemerintah maupun swasta)(Sedarmayanti & Hidayat, 2011).

Data ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Tanjungpinang berupa data pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja langsung yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Pemerintah Kota Tanjungpinang selama 12 tahun (2007 samapai dengan 2018) dalam tahunan.

### **3.3 Tehnik Pengumpulan Data**

Dalam rangka untuk memperoleh data yang dibutuhkan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

#### **1. Studi Pustaka**

Menurut (Arikunto, 2013) Studi Pustaka adalah metode pengumpulan data dengan cara mencari informasi melalui buku-buku, koran, majalah dan literatur lainnya. Studi pustaka yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mempelajari dan mengutip teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian dan memerlukan referensi dari buku-buku dan dokumen-dokumen yang ada untuk mendukung penelitian yang dilakukan seperti dari dokumen Laporan Realisasi Anggaran dari tahun 2007 s.d 2018, Struktur APBD Kota Tanjungpinang dari tahun 2007 s.d 2018, Buku Undang-Undang yang berlaku, Buku Peraturan-Peraturan yang berlaku dan dokumen-dokumen lainnya yang terkait dengan judul penelitian ini.

### **3.4 Definisi Operasional Variabel**

#### **3.4.1 Variabel Independen / variabel bebas (X)**

Menurut (Sarwono, 2014) variabel independen merupakan variabel bebas yang memberikan pengaruh terhadap variabel dependen/tergantung atau terikat.

Variabel independen/bebas yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel independen/bebas (X1) yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Variabel independen/bebas (X2) yaitu Dana Perimbangan. Adapun penjelasan dari kedua Variabel Independen/bebas tersebut yaitu sebagai berikut :



#### **3.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1)**

Pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Pada Penelitian ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) diukur menggunakan skala nominal dengan satuan rupiah dan dapat diketahui dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Tanjungpinang dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2018. (Republik Indonesia, 2012), dalam Undang-Undang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan atau menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya.

#### **3.4.1.2 Dana Perimbangan (X2)**

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan diukur menggunakan skala nominal dengan satuan rupiah dengan melihat nilai Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang termasuk dalam Dana Perimbangan dapat diketahui dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Tanjungpinang dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2018.

### 3.4.2 Variabel Dependen / variabel terikat (Y)

Menurut (Sarwono, 2014) variabel independent adalah variabel tergantung yang akan diukur nilainya akibat pengaruh dari faktor yang mempengaruhinya. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu Belanja Langsung.

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung diukur menggunakan skala nominal dengan satuan rupiah dan dapat diketahui dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Tanjungpinang dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2018.

### 3.5 Teknik Pengolahan Data

Menurut (Misbahuddin & Hasan, 2013) Pengolahan Data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu.

Adapun rumus untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota yaitu:

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang sah}$$

Adapun rumus untuk menghitung Dana Perimbangan Kabupaten/Kota yaitu :

$$\text{Dana Perimbangan} = \text{Dana Bagi Hasil (DBH)} + \text{Dana Alokasi Umum (DAU)} + \text{Dana Alokasi Khusus (DAK)}$$

Dan adapun rumus untuk menghitung Belanja Langsung Kabupaten/Kota yaitu:

$$\text{Belanja Langsung} = \text{Belanja Pegawai} + \text{Belanja Barang dan Jasa} + \text{Belanja Modal}$$

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Dalam melakukan teknik analisis data, Penulis menggunakan beberapa pengujian dengan menggunakan SPSS versi 22.

#### **3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif**

Menurut (Priyatno, 2014) adalah statistik untuk penggambaran tentang statistik data yang telah terkumpul seperti min, max, mean, sum, standar deviasi dan lain-lain yang berfungsi menerangkan keadaan, gejala atau persoalan. Dalam penelitian ini akan dijelaskan statistik dari variabel-variabel yang digunakan yaitu variabel independen (PAD dan Dana Perimbangan) dan variabel dependen (Belanja Langsung).

#### **3.6.2 Uji Asumsi Klasik**

##### **3.6.2.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas data adalah uji prasyarat tentang kelayakan data untuk di analisis dengan menggunakan statistik parametrik atau statistik nonparametrik. Dengan uji ini, sebuah data hasil penelitian dapat diketahui bentuk distribusi data tersebut, yaitu berdistribusi normal atau tidak normal (Misbahuddin & Hasan, 2013). Pengujian normalitas data menggunakan *Test of Normality Kolmogorov-*

*Smirnov*. Menurut (Singgih, 2012) dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan probabilitas (*Asymtotic Significance*), yaitu:

1. Jika probabilitas  $> 0,05$  maka distribusi dari model regresi adalah normal.
2. Jika probabilitas  $< 0,05$  maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal.

Pengujian normalitas data menggunakan cara grafik histogram dan probability plots. Cara grafik histogram dalam menentukan suatu data berdistribusi normal atau tidak, cukup membandingkan antara data riil/nyata dengan garis kurva yang terbentuk, apakah mendekati normal atau memang normal sama sekali. Jika data riil membentuk garis kurva cenderung simetris terhadap mean ( $\mu$ ) maka dapat dikatakan data berdistribusi normal. Dan cara normal probability plot lebih andal daripada cara grafik histogram karena cara ini membandingkan data riil dengan data distribusi normal secara kumulatif. Suatu data dikatakan berdistribusi normal jika garis data riil mengikuti garis diagonal. (Sunyoto, 2011).

### **3.6.2.2 Uji Multikolinieritas**

Uji multikonieritas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya satu atau lebih variabel bebas mempunyai hubungan dengan variabel bebas lainnya (Agus Purwanto & Ratih Sulistyastuti, 2017).

Dalam menentukan ada tidaknya multikolonieritas dapat digunakan dengan cara melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) dari hasil analisis dengan menggunakan SPSS versi 22. Apabila nilai *tolerance value*

lebih tinggi daripada 0,10 atau VIF lebih kecil daripada 10 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolonieritas.

### **3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain. Jika residualnya mempunyai varian yang sama, disebut terjadi homoskedastisitas sedangkan jika variannya tidak sama/berbeda disebut terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Homoskedastisitas terjadi jika scatterplot titik-titik hasil pengolahan data menyebar di bawah ataupun di atas titik origin (angka 0) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur (Sunyoto, 2011).

### **3.6.2.4 Uji Autokorelasi**

Menurut (Sunyoto, 2011) Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki masalah autokorelasi. Jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi tidak baik atau tidak layak dipakai prediksi.

Menurut (Priyatno, 2014) Salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan metode pengujian menggunakan uji Durbin Watson (DW) dengan pengambilan keputusan sebagai berikut:

- 1)  $DU < DW < 4-DU$  maka  $H_0$  diterima, artinya tidak terjadi autokorelasi
- 2)  $DW < DL$  atau  $DW > 4-DL$  maka  $H_0$  ditolak, artinya terjadi autokorelasi

- 3)  $DL < DW < DU$  atau  $4-DU < DW < 4-DL$ , artinya tidak ada kepastian atau kesimpulan yang pasti.

### 3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis linear berganda digunakan untuk mengetahui atau memperoleh gambaran mengenai pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Menurut (Misbahuddin & Hasan, 2013) Regresi Linear Berganda adalah regresi dimana variabel terikatnya (variabel Y) dihubungkan dengan dua lebih variabel bebas (variabel X).

Analisis regresi digunakan dengan menggunakan SPSS versi 22 yaitu untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja langsung di Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Persamaan analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana :

Y = Belanja Langsung

a = Konstanta

b<sub>1</sub>,b<sub>2</sub> = Koefisien Regresi

X<sub>1</sub> = Pendapatan Asli Daerah

X<sub>2</sub> = Dana Perimbangan

e = Faktor lain diluar model

### **3.6.4 Pengujian Hipotesis**

#### **3.6.4.1 Uji Parsial (uji t)**

Menurut (Sudjatmoko, 2015) Uji parsial ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh setiap variabel bebas secara individual (parsial) terhadap variabel terikat. Uji parsial menggunakan teknik t-test. Asumsi yang diajukan  $p\text{-value} < level\ of\ significant$  yang ditentukan maka  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak. Dengan kata lain  $t\ hitung > t\ tabel$  maka  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak. Dengan melihat hasil  $t$  hitung dari hasil SPSS dan mencari  $t$  tabel dengan menggunakan rumus  $= \alpha/2; n-k-1$  dimana  $\alpha$  ( $sig=0,05$ );  $k=2$  jumlah variabel independen,  $n=12$  jumlah data.

Uji terhadap nilai statistik  $t$  merupakan uji signifikansi parameter individual. Nilai statistik  $t$  menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependennya. Uji terhadap nilai statistik  $t$  juga disebut uji parsial yang berupa koefisien regres. Hasil uji ini pada output SPSS dapat dilihat pada tabel *coefficients*. Jika nilai signifikan atau probabilitas lebih kecil dari 0,05 berarti terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 berarti tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

#### **3.6.4.2 Uji Simultan (uji f)**

(Sudjatmoko, 2015) Uji F ini untuk mengetahui pengaruh variabel bebas  $X_1$  dan  $X_2$  secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel  $Y$ . Uji simultan menggunakan F-test. Asumsi yang diajukan jika  $H_a$  diterima jika  $F\ hitung > F$

tabel dengan taraf signifikansi  $\alpha=5\%$  atau 0.05. Dengan melihat hasil F hitung dari hasil SPSS dan mencari nilai F tabel dengan menggunakan rumus = (k;n-k), dimana k=2 jumlah variabel independen, n=12 jumlah data. Atau jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil uji f dilihat dalam tabel ANOVA dalam kolom sig, jika probabilitas  $< 0,05$ , maka dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen dan model regresi bisa dipakai untuk memprediksi variabel terikat.

### **3.6.5 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Uji Koefisien Determinasi bertujuan untuk mengukur besarnya persentase pengaruh semua variabel independen dalam model regresi terhadap variabel dependennya. Apabila nilai koefisien determinasi dalam model regresi semakin kecil atau (mendekati nol) berarti semakin kecil pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependennya. Atau dengan kata lain, nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan semua variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Sebaliknya, apabila nilai  $R^2$  semakin mendekati 100% berarti semua variabel independen dalam model memberikan hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel dependennya atau semakin besar pengaruh semua variabel independennya terhadap variabel dependen (Agus Purwanto & Ratih Sulistyastuti, 2017). Untuk koefisien determinasi  $R^2$  nol variabel independen sama sekali tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.





## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Purwanto, E., & Ratih Sulistyastuti, D. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial*. Yogyakarta: Gava Media.
- Anggota IKAPI. (2014). *Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015*. Bandung: Fokusmedia.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- BPS Kota Tanjungpinang. (2018). *Kota Tanjungpinang Dalam Angka*. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang.
- C.S.T. Kansil & Christine S.T Kansil. (2014). *Pemerintah Daerah di Indonesia-Hukum Administrasi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ernayani, R. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013). *JSHP ( Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan)*, 1(1), 43. <https://doi.org/10.32487/jshp.v1i1.234>
- Halim, A., & Iqbal, M. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Pечetakan-Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah-Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mahsun, & Sulistiyowati, F. (2013). *Akuntansi Sektor Publik-Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPFE Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik-Edisi Terbaru*. Yogyakarta: CV.Andi Offset.
- Misbahuddin, & Hasan, I. (2013). *Analisis Data Penelitian dengan Statistik-Edisi Kedua*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nordiawan, Deddi, Putra, Iswayudi Sondi & Rahmawati, M. (2009). *Akuntansi*

- Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Priyatno, D. (2014). *SPSS 22: Pengolahan Data Terpraktis*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Purwanto. (2011). *Statistika Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ratna, N. K. (2010). *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu-Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Republik Indonesia. (2012). *Standar Akuntansi Pemerintahan-Peraturan Pemerintah Republik Indonesia*. Bandung: Fokusmedia.
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah-Edisi Terbaru*. Bandung: Fokusindo Mandiri.
- Saptika, A. (2010). *Otonomi Daerah*. Jakarta Timur: CV. Ghina Walafafa.
- Sarwono, J. (2014). *Riset Skripsi dan Tesis dengan SPSS 22*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sedarmayanti, & Hidayat, S. (2011). *Metodologi Penelitian*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Setiyawati, N. H. & H. (2014). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung Di Provinsi Jawa Tengah. *Akuntansi*, XVIII(01), 45–58.
- Simanjuntak, L. L. F., Subeki, A., Ferina, I. S., & Yusrianty, H. (2013). Analysis of Flypaper Effect in General Allocation Fund and Regional Original Income To Regional Expenditure. *The 14th FourA Annual Conference 2013, Penang, Malaysia*, 1–29.
- Singgih, S. (2012). *Panduan Lengkap SPSS Versi Terbaru*. Jakarta: Komputindo, PT Elek Media.
- Soemantri, S. (2014). *Otonomi Daerah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sri Rahayu, A. (2014). *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sudjatmoko. (2015). *Leader Transformasional*. Jawa Tengah: Penembahan Senopati.
- Sugiono. (2011). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. (2016). *Metode Penelitian-Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:

Alfabeta.

- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Sektor Publik-Teori,Konsep,Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sunyoto, D. (2011). *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis*. Jakarta: PT Buku Seru.
- Surya Hamdani, 2014. (2014). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Timur.
- Yani, A. (2009). *Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia-Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yulsiati, H., & Oktariani, S. (2010). The Effect Of Local Revenus-Sharing And A General Allocation Of Funds To The Direct Expenditure On The Regency / Municipality Governments In South Sumatra Province, 15–27.

## CURICULUM VITAE



Nama : Kundariati  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjungpinang, 07 Desember 1982  
Status : Cerai Hidup  
Agama : Islam  
Email : kundariati@gmail.com  
Alamat : Jl. Puncak No. 36 RT.005 RW.005 Kel. Bukit Cermin  
Tanjungpinang  
Pendidikan : - SD Negeri 002 Tanjungpinang (1990-1996)  
- SMP Negeri 3 Tanjungpinang (1996-1999)  
- SMK Negeri 1 Tanjungpinang (1999-2001)  
- Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan  
Tanjungpinang (2015-2019)